KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Senayan sarankan pemerintah perbaiki kualitas pembangunan
**Tanggal** : Kamis, 23 Juli 2026
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka
**Halaman** : 3

## Tarif Lepas Status WNI Naik Drastis

# Senayan Sarankan Pemerintah Perbaiki Kualitas Pembangunan

**Senayan menyoroti aturan pengenaan tarif sebesar Rp 5 juta bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin melepas status kewarganegaraan.**

KETUA DPR Puan Maharani berharap agar seluruh WNI tetap mencintai Tanah Air dan tidak memilih untuk berpindah kewarganegaraan. "Semoga semua warga negara Indonesia tetap cinta Indonesia," ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Diketahui, Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengenaan tarif sebesar Rp 5 juta bagi WNI yang mengajukan permohonan untuk melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Kebijakan baru itu meningkatkan 5 kali lipat dari yang awalnya hanya Rp 1 juta. Sedangkan permohonan kewarganegaraan Indonesia yang diajukan Warga Negara Asing (WNA) akan dikenakan biaya Rp 75 juta. Jumlah itu naik dari sebelumnya Rp 50 juta.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Kebijakan itu menjadi sorotan publik di tengah informasi adanya 8 ribu WNI yang memilih melepaskan kewarganegaraan dalam 5 tahun terakhir.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menambahkan, perubahan kebijakan mengenai kewarganegaraan tidak cukup dimaknai sebagai penyesuaian terhadap prosedur administrasi maupun besaran tarif layanannya. Pemerintah seharusnya fokus pada fenomena banyaknya warga yang ingin melepas status kewarganegaraan.

Menurut Andreas, di balik setiap kebijakan kewarganegaraan, terdapat tanggung jawab negara yang jauh lebih besar. Yaitu, memastikan setiap warga negara memiliki keyakinan Indonesia adalah tempat terbaik untuk hidup, berkarya, membangun keluarga, dan mewujudkan masa depannya.

"Fenomena WNI lepas kewarganegaraan akan menjadi citra kurang baik bagi Indonesia karena dianggap sebagai negara yang gagal memberikan perlindungan dan rasa aman dan nyaman bagi warga negaranya sendiri," tandas Andreas di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

FOTO: TEDDY KROENIRRRM.ID

Puan Maharani

Menurut Andreas migrasi sebenarnya merupakan hal yang wajar. Namun apabila dilakukan secara besar-besaran dalam kurun waktu yang sebentar, hal itu menunjukkan ada persoalan mendasar di balik keputusan mereka ramai-ramai melepaskan status kewarganegaraan. Dengan itu, Pemerintah diminta fokus melakukan evaluasi.

"Fokus kenapa banyak warga Indonesia yang ingin melepaskan kewarganegaraan. Bukan justru memanfaatkannya sebagai sumber pemasukan kas Negara," kritik politisi PDIP ini.

Andreas mengingatkan, negara tidak boleh berhenti pada pengaturan mengenai bagaimana seseorang memperoleh atau melepaskan status kewarganegaraan. Karena fenomena WNI berbondong-bondong melepas kewarganegaraan merupakan hal yang cukup serius.

Keputusan WNI melepas kewarganegaraan, lanjut dia, tentu dengan alasan yang berbeda-beda dari masing-masing WNI. Tapi apapun alasannya, bila sampai terjadi secara masif, tentu prinsip tujuan bernegara yaitu melindungi seganap tumpah darah Indonesia patut untuk dipertanyakan.

Untuk itu, Andreas mendorong Pemerintah mencari solusi untuk mengatasi fenomena maraknya WNI melepas kewarganegaraan. Termasuk dengan kembali menarik warga negara yang memutuskan meninggalkan status WNI seperti strategi *brain gain*.

Diketahui, brain gain adalah fenomena suatu negara atau wilayah mendapatkan keuntungan ekonomi dan intelektual akibat masuknya atau kembalinya tenaga kerja sangat terampil, profesional, dan berpendidikan tinggi.

Hal yang penting sekarang, jelas dia, bukanlah mencari pemasukan negara dari permohonan WNI melepas status kewarganegaraan, tapi bagaimana Pemerintah memastikan tidak ada warga negara yang merasa kehilangan harapan terhadap tanah air. Seperti kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, pelayanan publik yang adil, perlindungan hukum, maupun kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Apabila masih terdapat warga yang memandang masa depan lebih menjanjikan di luar negeri, Andreas menilai, hal itu harus menjadi bahan evaluasi bagi negara untuk terus memperbaiki kualitas pembangunan dan pelayanan kepada rakyat. "Pemerintah perlu menyusun National Citizen Trust and Retention Strategy atau strategi nasional yang menjadikan peningkatan kepercayaan rakyat terhadap negara sebagai salah satu tujuan utama pembangunan," jelas politisi PDIP ini.

Strategi tersebut, tambah dia, harus berangkat dari identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk menetap, berkarya, dan membangun masa depan di Indonesia. Caranya dengan memperluas kesempatan kerja, memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki pelayanan publik, dan menghadirkan kepastian hukum yang memberi rasa aman bagi setiap warga negara. ■ TIF